



Peraturan Menteri Keuangan No 177/PMK.05/2015 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga



Rakoning Pemerintah Lainnya	C.2.3	6.615.552.720.213	8.539.801.162.932
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	292.795.937.959	518.919.028.152
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	252.905.321.124	652.344.354.246
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.756.875.778.441	8.652.179.999.211
Kas pada BLU	C.2.7	13.016.388.295.063	7.340.595.020.819
Jumlah Kas dan Bank	C.2.8	121.261.988.260.868	117.332.563.445.378
Utang Mula dan Rekening BUN	C.2.9	1.408.995.948.910	1.876.259.417.429
Pinjaman	C.2.10	108.063.462.383.641	70.945.271.446.620
Pinjaman Pajak	C.2.11	19.885.890.412.635	9.020.978.486.579
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.12	60.470.939.992	60.404.443
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.13	1.279.165.315.147	38.591.410.963
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.14	1.216.391.989.142	4.842.752.363.007
Utang Mula Belanja	C.2.15	24.977.956.337.945	614.122.632.355
Pinjaman dari Kegiatan BLU	C.2.16	4.462.365.347.776	1.121.530.274.693
Pinjaman Lain-lain	C.2.17	(75.330.131.480.509)	12.589.882.121.588
Bagian Lancar Penerimaan Pinjaman	C.2.18	64.615.601.240.772	-
Penyisihan Pinjaman Tidak Terlagih - Pinjaman	C.2.19	170.553.016.059	99.173.594.170.448
Jumlah Pinjaman (Bersih)	C.2.20	135.839.486.878	30.750.000.000
Investasi Jangka Pendek	C.2.21	306.302.502.037	30.750.000.000
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.22	59.214.846.453.160	36.396.060.081.005
Jumlah Investasi Jangka Pendek	C.2.23	266.987.624.111.647	254.779.627.714.260
Persediaan	C.2.24	8.195.256.111.510	43.367.037.927.876
Jumlah Aset Lancar	C.2.25	4.742.737.167.996	98.464.787.895
Investasi Jangka Panjang	C.2.26	736.991.554.233.014	564.087.107.302.153
Investasi Non Permanen	C.2.27	87.009.772.794	94.659.618.306.997
Rak Dana Investasi/Rak. Pembinaan Daerah	C.2.28	737.985.801.200.298	659.053.262.303.655
Dana Berwujud	C.2.29	768.038.794.479.804	768.038.794.479.804
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.30	806.436.356.598.744	565.920.545.473.056
Investasi Permanen	C.2.31	184.852.199.595.042	150.868.973.195.411
Investasi Permanen PMN	C.2.32	152.223.086.918.162	137.042.621.023.205
Investasi Permanen BLU	C.2.33	347.164.628.245.235	276.682.171.786.674
Investasi Permanen Lainnya	C.2.34	11.517.125.807.802	7.748.128.789.613
Jumlah Investasi Permanen	C.2.35	60.780.773.332.765	46.038.227.718.084
Jumlah Investasi Jangka Panjang	C.2.36	1.567.974.174.587.756	1.184.391.167.455.585
Ases Tetap	C.2.37	1.375.031.741	1.377.994.323
Tanah	C.2.38	249.626.434.418	38.224.179.261
Peralatan dan Mesin	C.2.39	3.737.310.550.736	39.612.173.684
Gedung dan Bangunan	C.2.40	3.988.112.006.895	212.609.665.200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.41	212.907.765.825	2.076.158.163.656
Aset Tidak Berwujud	C.2.42	44.542.275.959.109	12.406.618.813.595
Aset Tak Berwujud	C.2.43	12.406.618.813.595	9.351.448.050.646
Dana yang Dibatal Penggunaannya	C.2.44	37.253.051.374.408	40.987.103.326.394

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -13-

Latar Belakang

- Implementasi akuntansi berbasis akrual Tahun 2015
- Amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagai Laporan Keuangan yang bertujuan umum (*par 3 dan 4 PSAP 01 SAP*)

PMK Nomor: 177 /PMK.05/2015 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga

LAMPIRAN

BATANG TUBUH

Pasal 1: Definisi

Pasal 2: Kewajiban menyusun dan menyampaikan LKKL dan jenis laporan K/L

Pasal 3: Pedoman penyusunan LKKL

Pasal 4 dan 5: Kewajiban untuk membentuk unit akuntansi, serta menyusun dan menyampaikan LK secara berjenjang

Pasal 6: Modul Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

PMK Nomor: 177 /PMK.05/2015 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga

BATANG TUBUH

LAMPIRAN

Bab I: Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pada Kementerian Negara/Lembaga

Bab II: Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Bab III: Sistematika Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Bab IV.A: Ilustrasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

Bab IV.B: Ilustrasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

Bab IV.C: Ilustrasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1

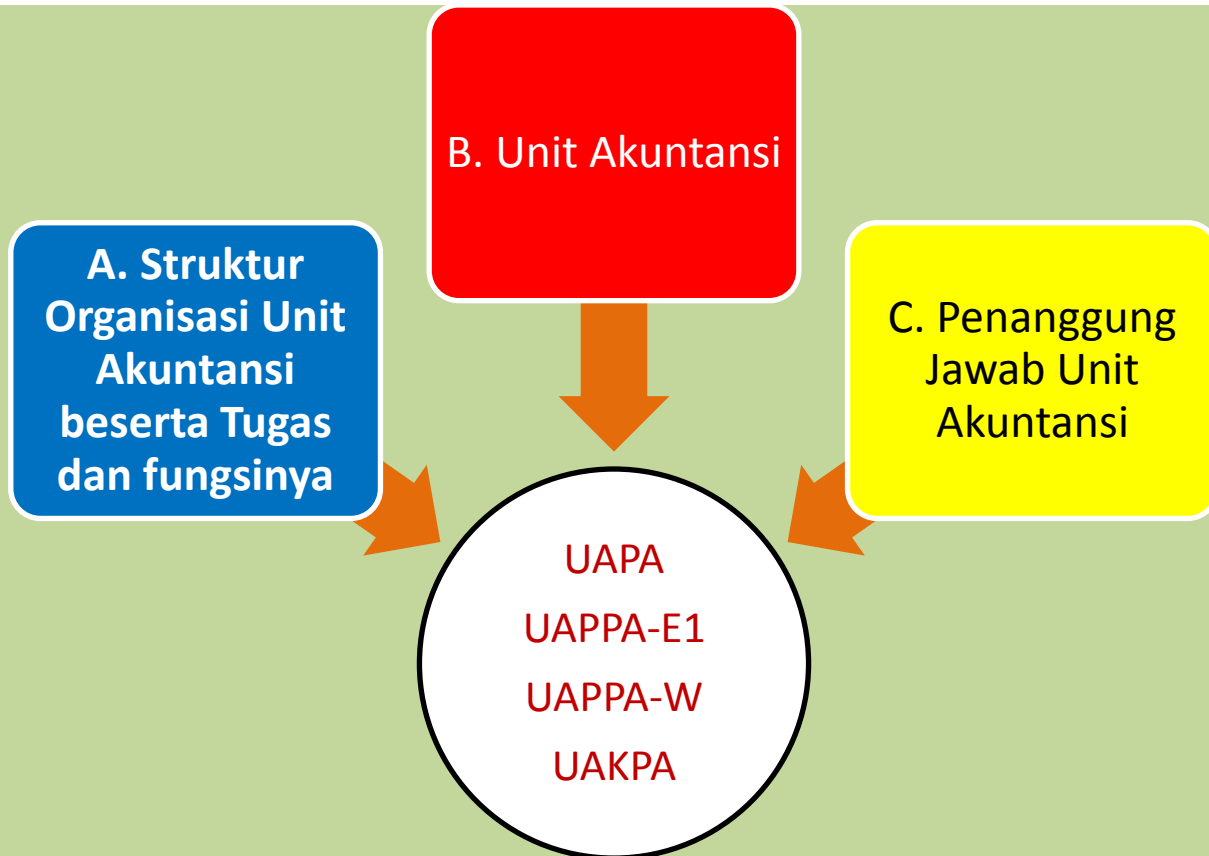
Bab IV.D: Ilustrasi Laporan Keuangan Tingkat UAPA



BAB I

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



Pembentukan Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga (1/3)

Tujuan dibentuknya Unit Akuntansi adalah agar diperoleh informasi keuangan berupa laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang didesentralisasi hingga tingkat satuan kerja.

Pembentukan Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga (2/3)

Pembentukan Koordinator UAPPA-W

untuk Dana Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama oleh Kepala
Daerah dapat dilakukan dalam rangka
mendapatkan informasi terkait program
Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah
yang dipimpinnya.

Pembentukan Unit Akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga (3/3)

UAPPA-W pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tidak wajib dibentuk bila:

- K/L hanya terdiri dari satu satuan kerja
- Dalam satu wilayah kerja dan satu eselon I hanya terdapat satu satuan kerja

Ilustrasi Pembentukan UAPPA-W Kementerian Negara/Lembaga (1/3)

K/L – WWW

Eselon I K/L	Satuan Kerja		Kewajiban
	Jumlah	Kewenangan	
A	2	Kantor Daerah (KD)	Wajib
B	3	Kantor Daerah (KD)	Wajib
C	4	Kantor Daerah (KD)	Wajib
D	5	Kantor Daerah (KD)	Wajib
E	3	Kantor Daerah (KD)	Wajib

Ilustrasi Pembentukan UAPPA-W Kementerian Negara/Lembaga (2/3)

K/L - XXX

Eselon I K/L	Satuan Kerja		Kewajiban
	Jumlah	Kewenangan	
A	2	Kantor Daerah (KD)	Wajib
B	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib
C	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib
	1	Dekonsentrasi (DK)	
	1	Tugas Pembantuan (TP)	
D	2	Kantor Daerah (KD)	Wajib
	1	Dekonsentrasi (DK)	Tidak Wajib
E	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib

Ilustrasi Pembentukan UAPPA-W Kementerian Negara/Lembaga (3/3)

K/L - YYY

Eselon I K/L	Satuan Kerja		Kewajiban
	Jumlah	Kewenangan	
A	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib
B	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib
C	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib
D	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib
E	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib

Ilustrasi Pembentukan UAPPA-W Kementerian Negara/Lembaga (3/3)

K/L - ZZZ

Eselon I K/L	Satuan Kerja		Kewajiban
	Jumlah	Kewenangan	
A	1	Kantor Daerah (KD)	Tidak Wajib

Struktur Organisasi Entitas Akuntansi/Pelaporan (UAKPA)

Penanggung jawab

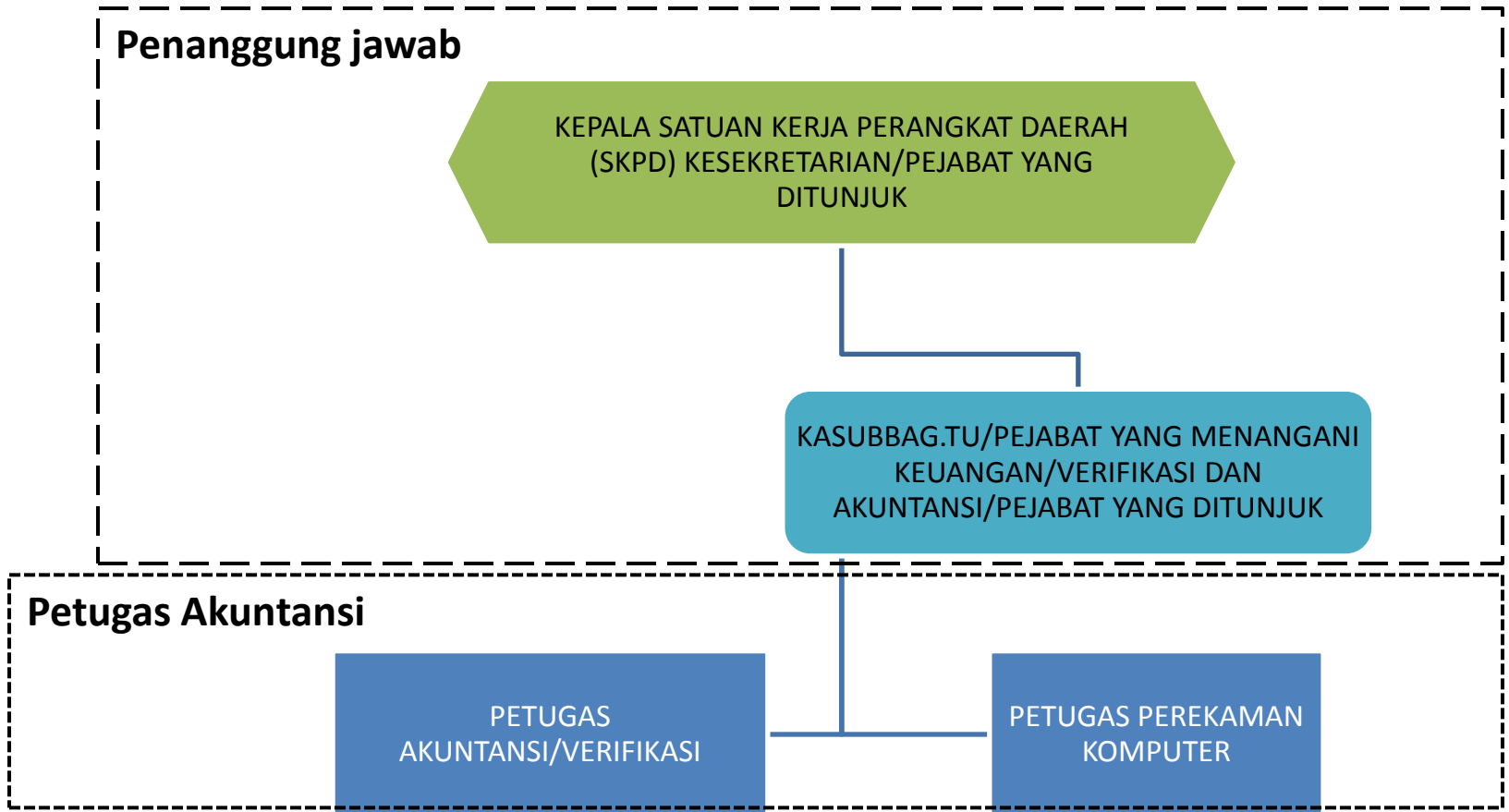
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KESEKRETARIAN/PEJABAT YANG
DITUNJUK

KASUBBAG.TU/PEJABAT YANG MENANGANI
KEUANGAN/VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK

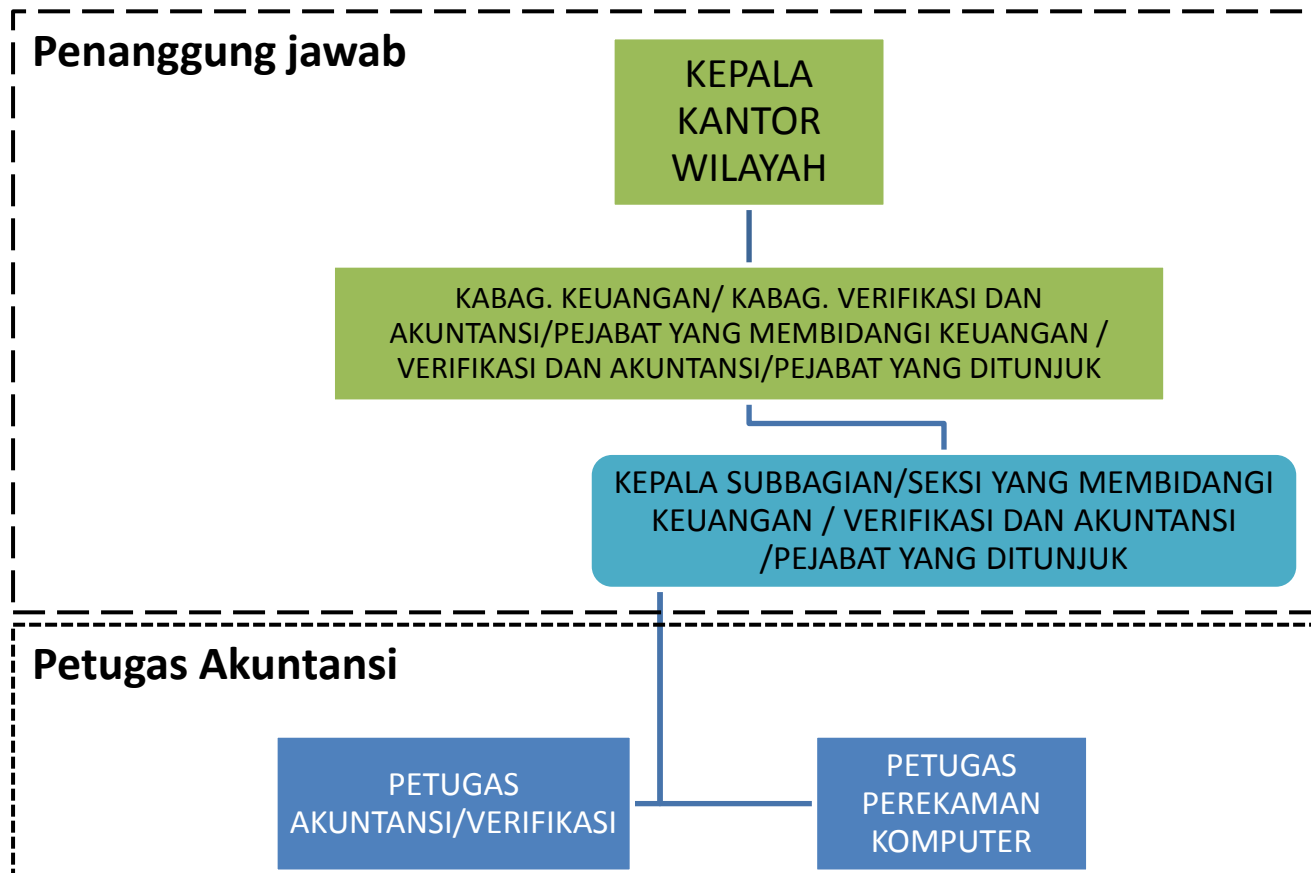
Petugas Akuntansi

PETUGAS
AKUNTANSI/VERIFIKASI

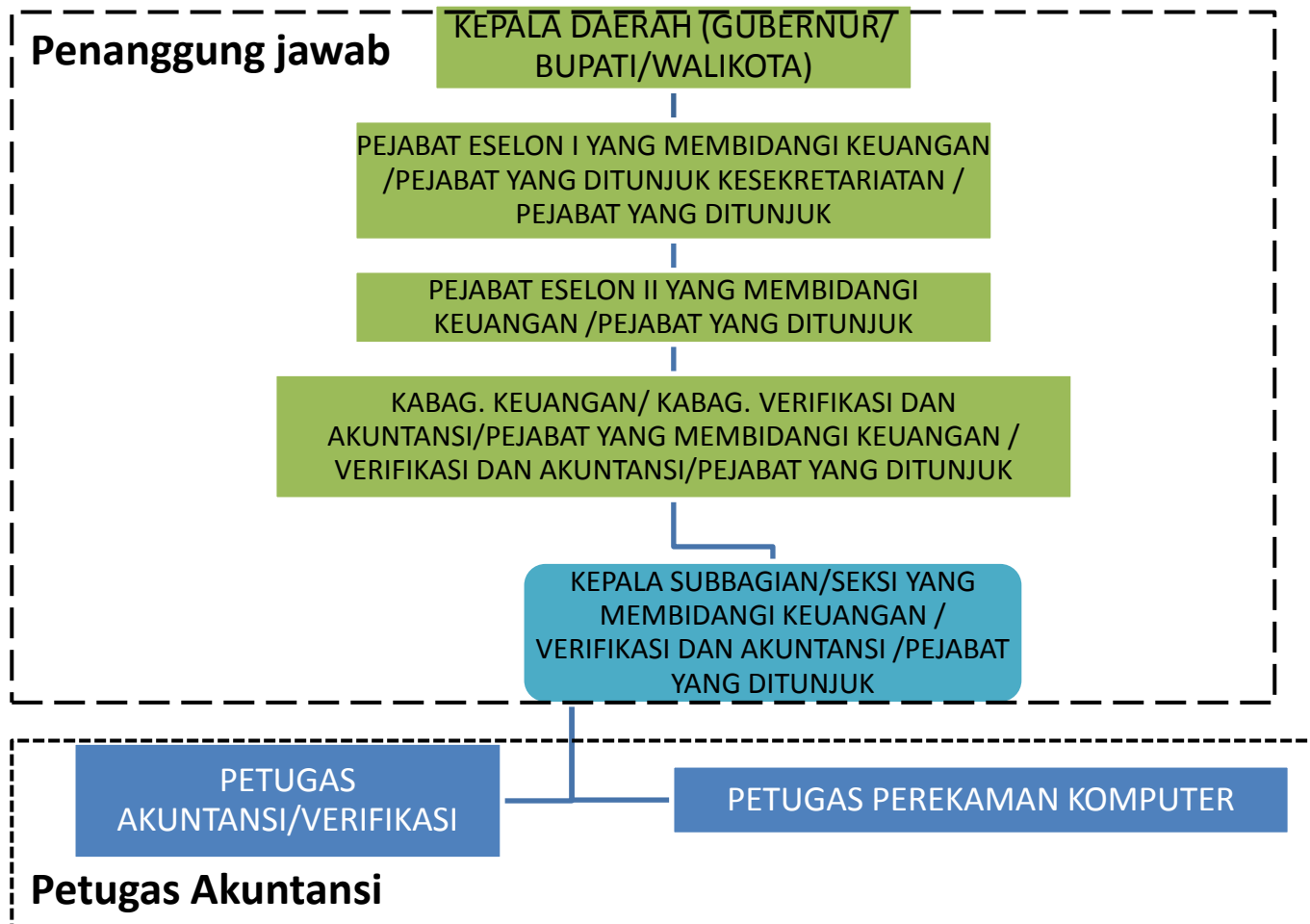
PETUGAS PEREKAMAN
KOMPUTER



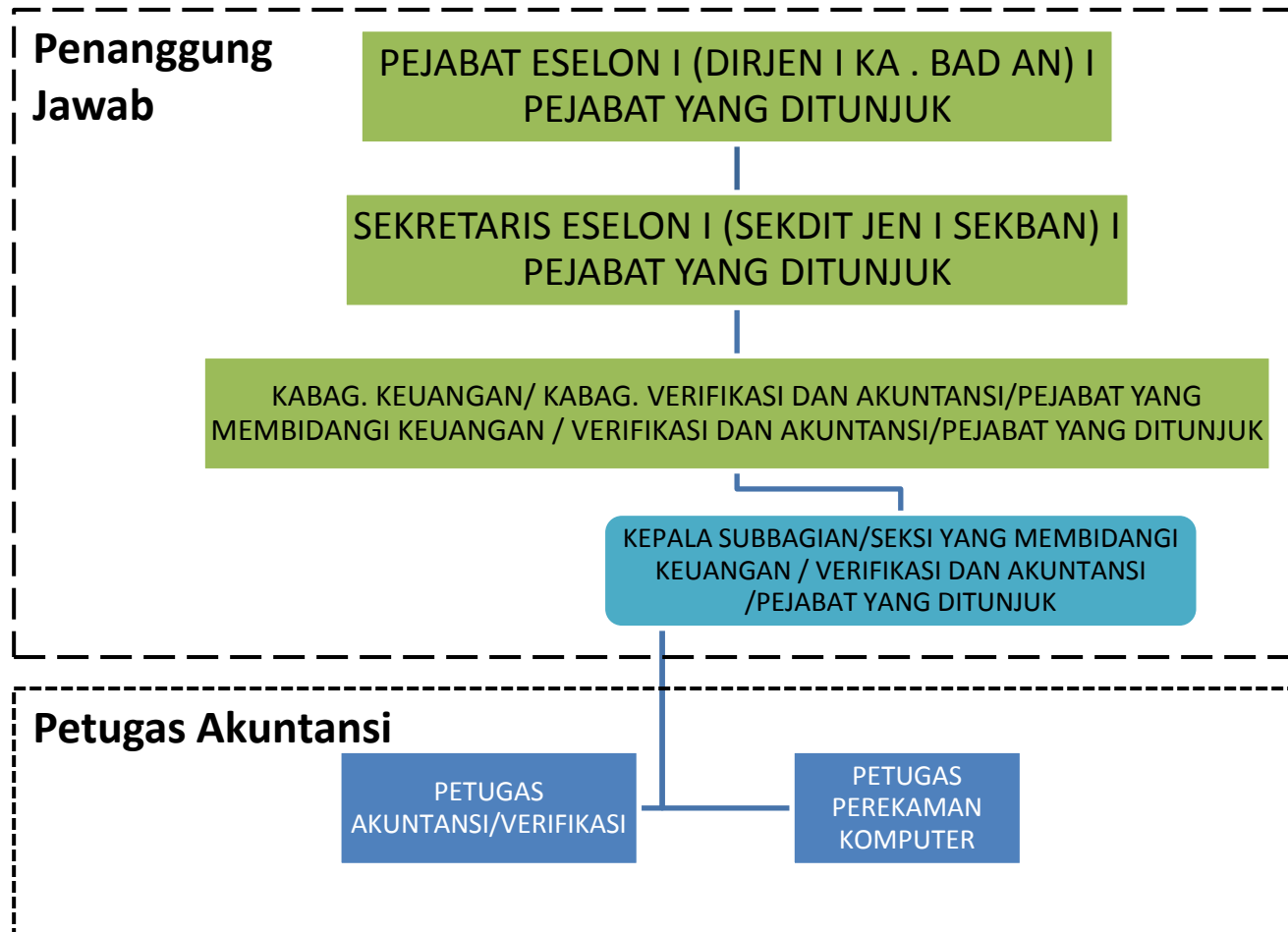
Struktur Organisasi Entitas Akuntansi/Pelaporan (UAPPA-W)



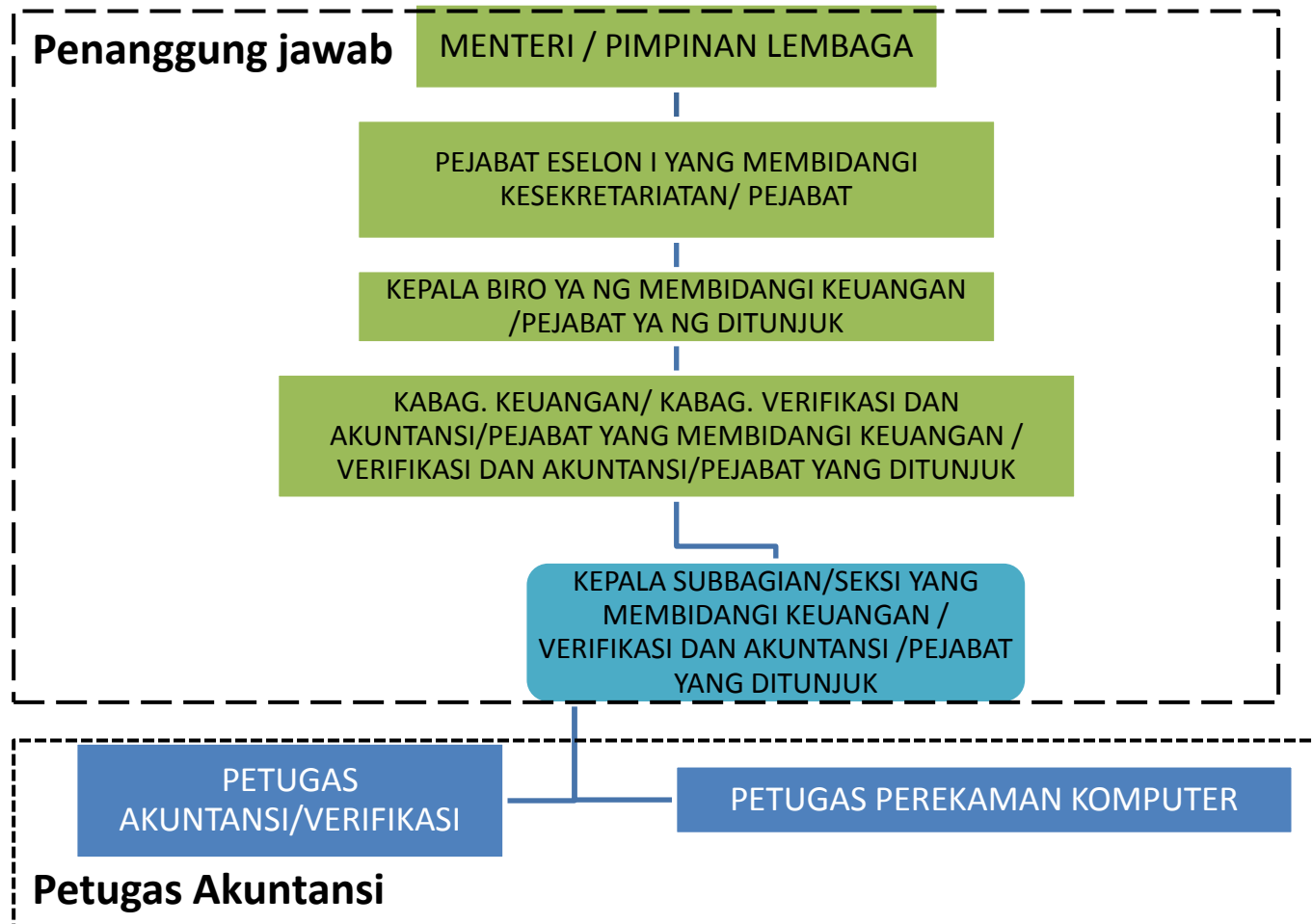
Struktur Organisasi Entitas Akuntansi/Pelaporan (Koor. UAPPA-W)



Struktur Organisasi Entitas Akuntansi/Pelaporan (UAPPA-E1)



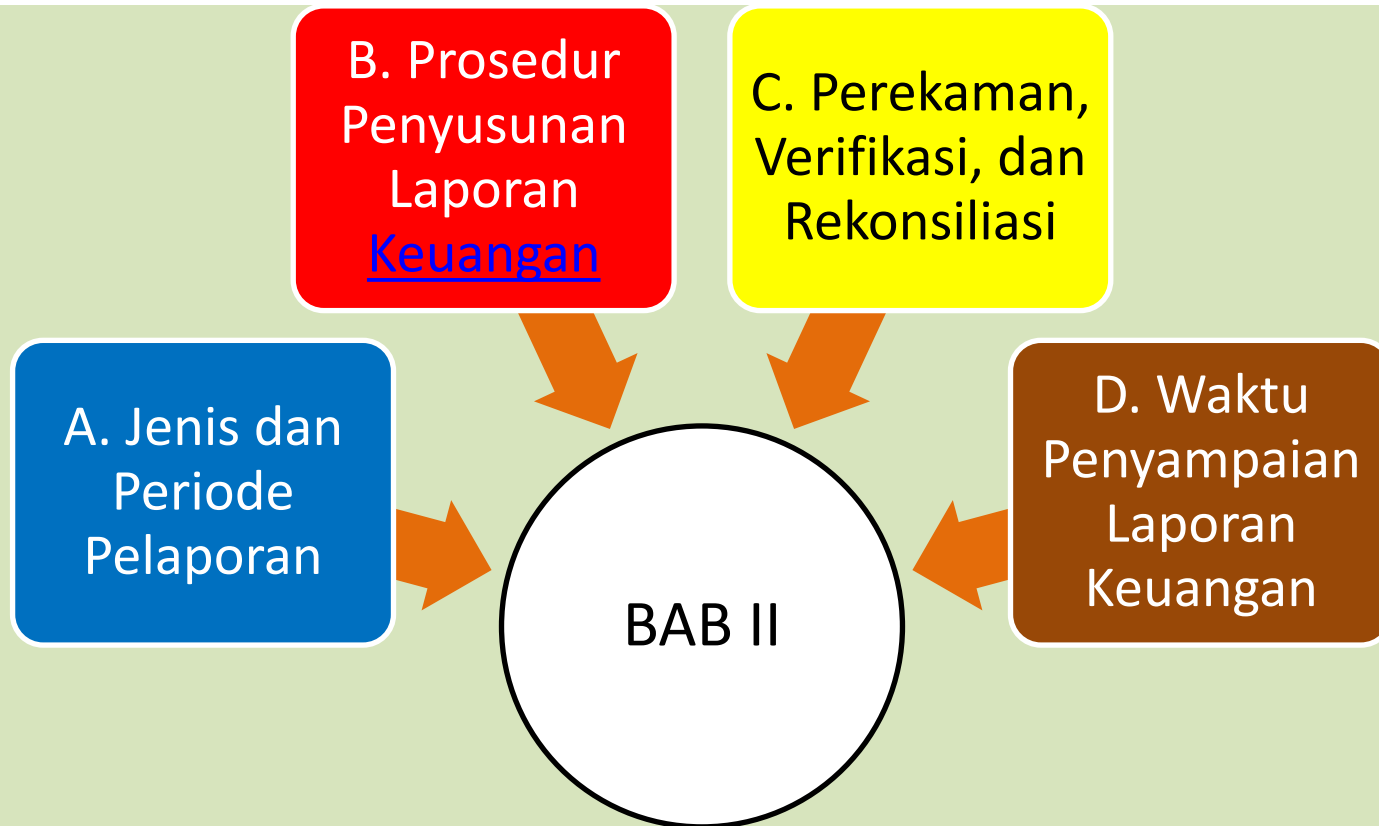
Struktur Organisasi Entitas Akuntansi/Pelaporan (UAPA)





BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA



Jenis dan Periode Penyampaian Laporan UAKPA ke KPPN dan UPPA-W/E1



Jenis dan Periode Penyampaian Laporan UAPPA-W ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UPPA-E1



Jenis dan Periode Penyampaian Laporan UPPA-E1 ke UAPA

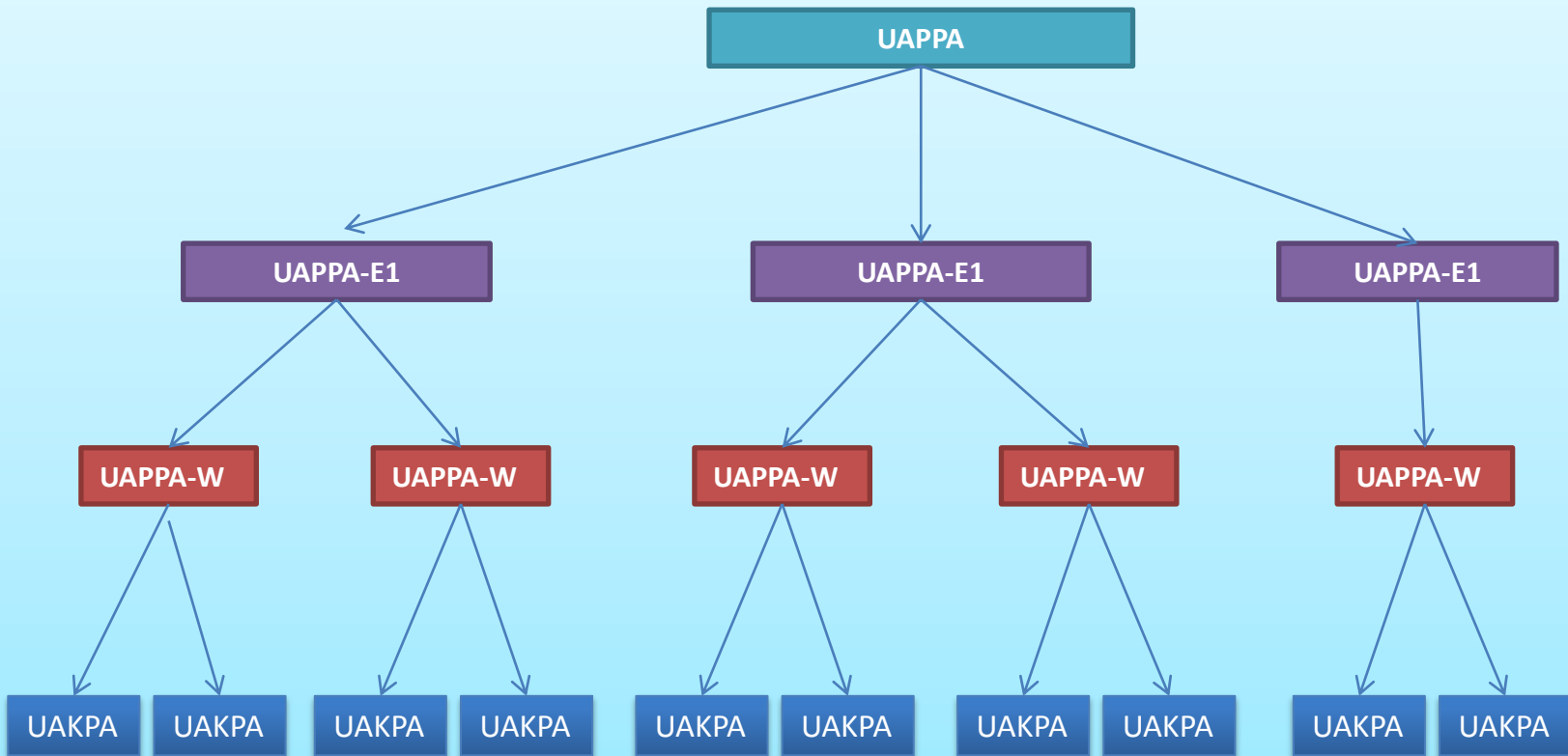


Jenis dan Periode Penyampaian Laporan UPPA ke Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan

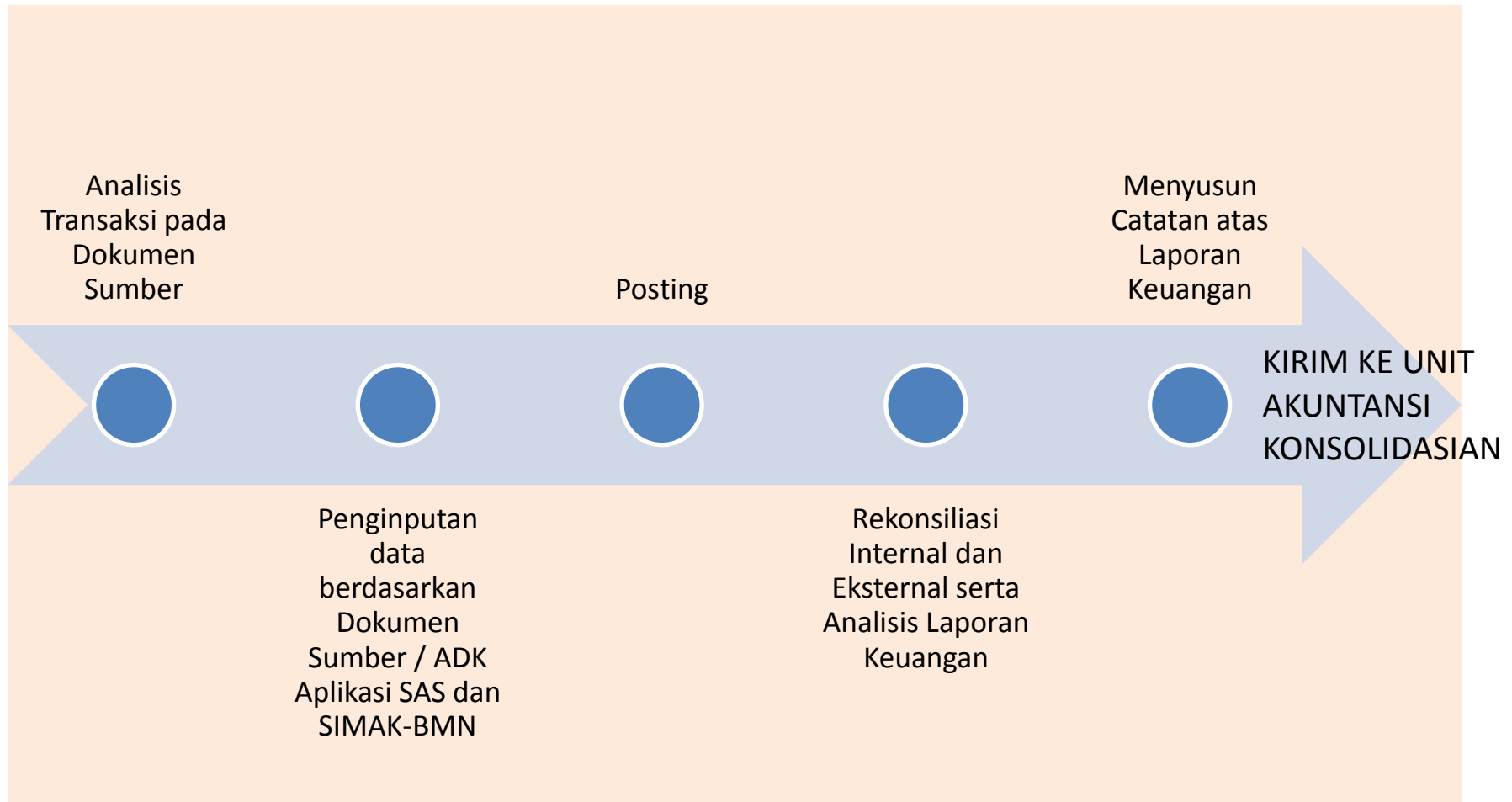


JENJANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- Penyusunan LK Secara Berjenjang



Cara Menyusun Laporan Keuangan UAKPA



Cara Menyusun Laporan Keuangan UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPACara Menyusun Laporan Keuangan UAKPA

Penginputan data
berdasarkan ADK
Aplikasi SAIBA
Unit Akuntansi di
bawah lingkungan
kerja

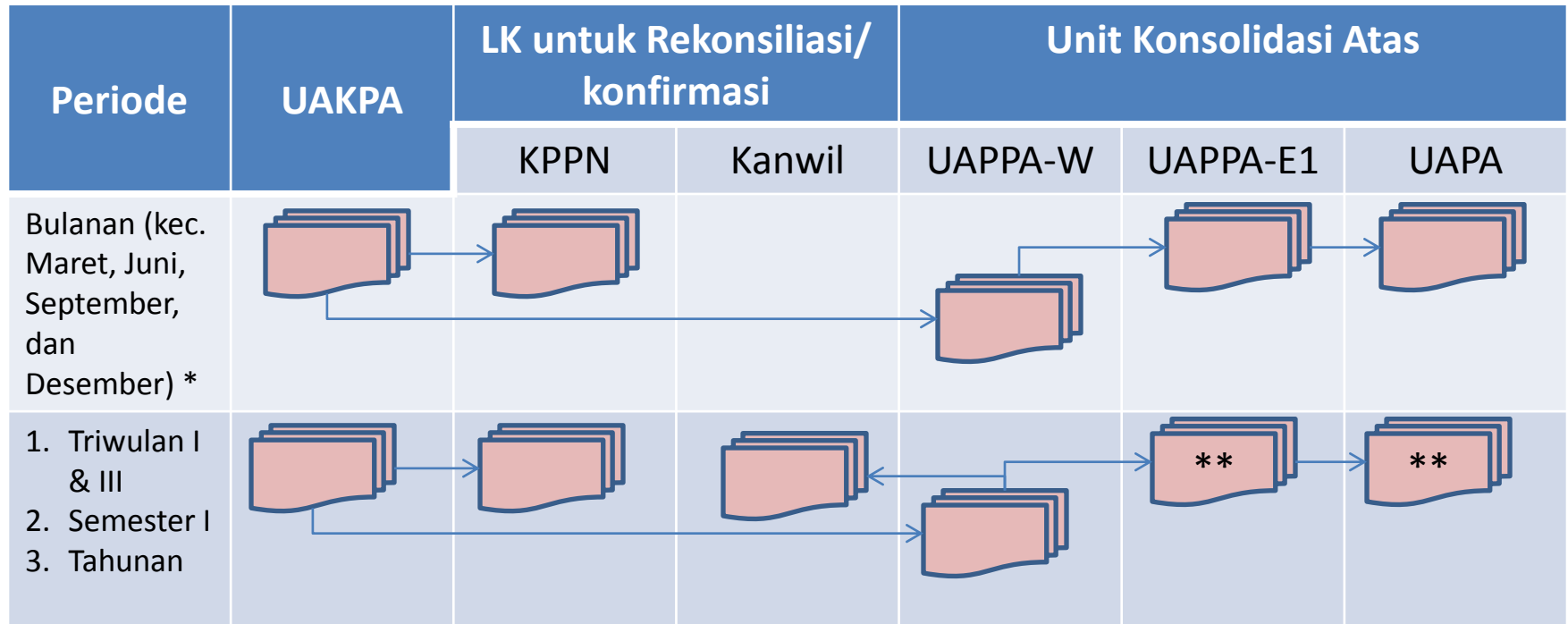
Konfirmasi dengan
pihak BUN dan
Analisis Laporan
Keuangan

KIRIM KE UNIT
AKUNTANSI
KONSOLIDASIAN
DI ATASNYA

Periksa Register
Posting

Menyusun Catatan
atas Laporan
Keuangan

Cara Menyusun Laporan Keuangan Penggabungan di setiap tingkatan Unit Akuntansi (1/3)



- *) Tidak termasuk UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
- ***) Dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPB Laporan Keuangan digabung dengan menggunakan aplikasi jadi harus ada pengiriman ADK, softcopy CALK, dan hardcopy

Cara Menyusun Laporan Keuangan Penggabungan di setiap tingkatan Unit Akuntansi (2/3)

Periode	LK untuk Rekonsiliasi/konfirmasi		Unit Konsolidasi Atas
	KPPN	Kanwil	UAPPA-W UAPPA-E1 UAPA
Bulanan (kec. Maret, Juni, September, dan Desember) *	<ol style="list-style-type: none"> 1. LRA Belanja – Bulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3. LRA Pendapatan – Bulanan 4. LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5. Laporan Operasional – Bulanan 6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7. Neraca – Bulanan 8. Neraca Percobaan –Bulanan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. LRA Belanja – Bulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3. LRA Pendapatan – Bulanan 4. LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5. Laporan Operasional – Bulanan 6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7. Neraca – Bulanan 8. Neraca Percobaan –Bulanan

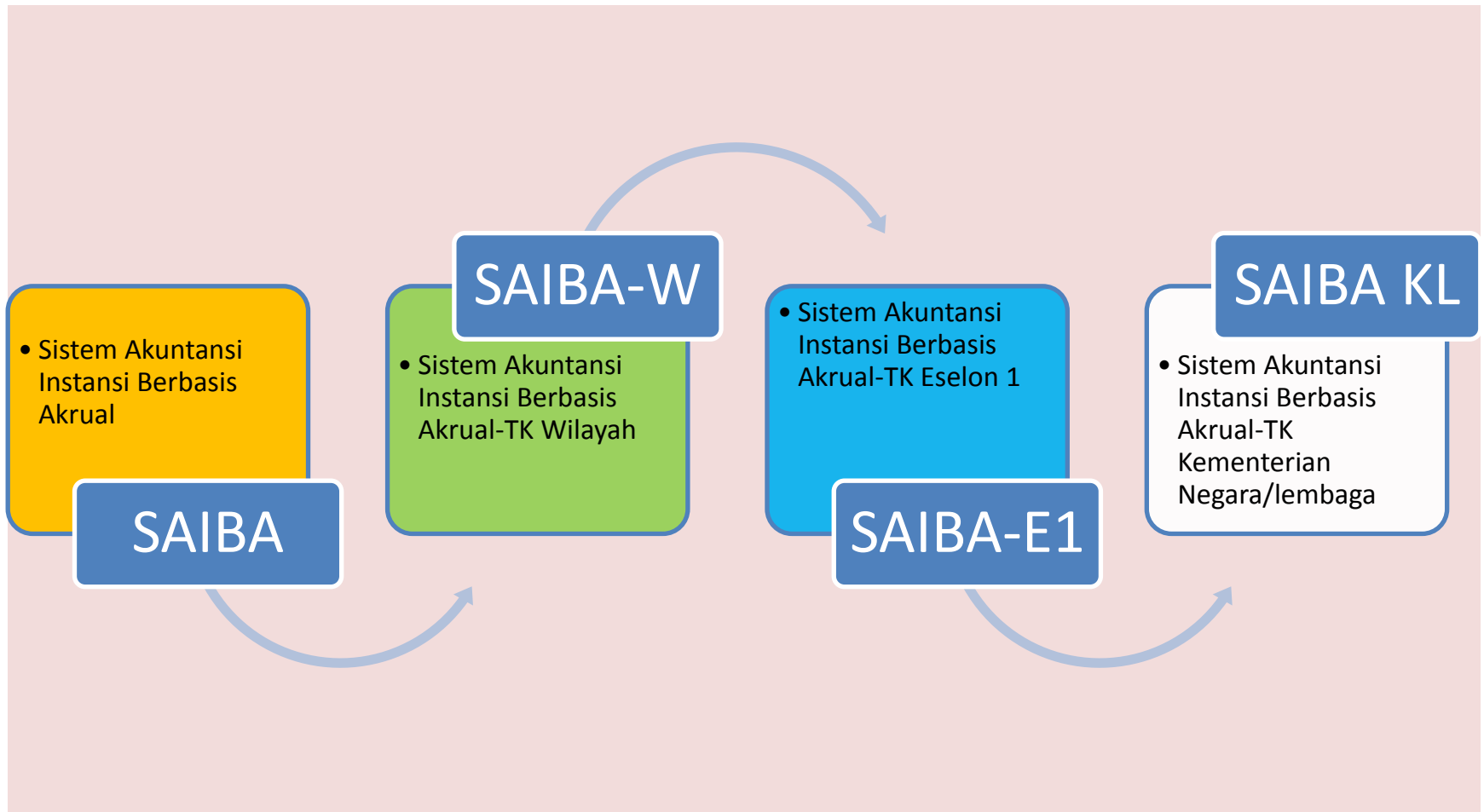
Cara Menyusun Laporan Keuangan Penggabungan di setiap tingkatan Unit Akuntansi (3/3)

Periode	LK untuk Rekonsiliasi		Unit Konsolidasi Atas
	KPPN	Kanwil	UAPPA-W/UAPPA-E1/ UAPA
Triwulan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. LRA Belanja – Bulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3. LRA Pendapatan – Bulanan 4. LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5. Laporan Operasional – Bulanan 6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7. Neraca – Bulanan 8. Neraca Percobaan – Bulanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LRA Belanja – Bulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3. LRA Pendapatan – Bulanan 4. LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5. Laporan Operasional – Bulanan 6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7. Neraca – Bulanan 8. Neraca Percobaan – Bulanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LRA Belanja – Bulanan 2. LRA Pengembalian Belanja – Bulanan 3. LRA Pendapatan – Bulanan 4. LRA Pengembalian Pendapatan – Bulanan 5. Laporan Operasional – Bulanan 6. Laporan Perubahan Ekuitas – Bulanan 7. Neraca – Bulanan 8. Neraca Percobaan – Bulanan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semester I 2. Tahunan 	Mengikuti sistematika laporan keuangan		

Keterbandingan

No	Jenis Laporan Keuangan	Semesteran
1	Laporan Realisasi Anggaran	LRA semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun sebelumnya
2	Neraca	Neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan Neraca per 31 Desember tahun sebelumnya.
3	Laporan Operasional	LO semester I tahun berjalan dengan LO semester I tahun sebelumnya
4	Laporan Perubahan Ekuitas	LPE semester I tahun berjalan dengan LPE semester I tahun sebelumnya

PEREKAMAN, VERIFIKASI DAN REKONSILIASI



JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN I

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-		12 April 2XX1	
UAPPA-W	14 April 2XX1	6 hari	20 April 2XX1	2 Hari
UAPPA-E1	22 April 2XX1	4 hari	26 April 2XX1	2 Hari
UAPA	28 April 2XX1	8 hari	07 Mei 2XX1	2 Hari
Kemenkeu	07 Mei 2XX1			

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-		12 Juli 2XX1	
UAPPA-W	14 Juli 2XX1	6 hari	20 Juli 2XX1	2 Hari
UAPPA-E1	22 Juli 2XX1	3 hari	25 Juli 2XX1	2 Hari
UAPA	27 Juli 2XX1	4 hari	31 Juli 2XX1	2 Hari
Kemenkeu	31 Juli 2XX1			

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN III

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-		12 Okt 2XX1	
UAPPA-W	14 Oktober 2XX1	6 hari	20 Okt 2XX1	2 Hari
UAPPA-E1	22 Oktober 2XX1	5 hari	27 Okt 2XX1	2 Hari
UAPA	29 Oktober 2XX1	9 hari	07 Nop 2XX1	2 Hari
Kemenkeu	07 Nopember 2XX1			

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUNAN

Unit Organisasi	Terima	Proses	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPA	-		20 Jan 2XX2	
UAPPA-W	22 Jan 2XX2	7 hari	29 Jan 2XX2	2 Hari
UAPPA-E1	01 Feb 2XX2	7 hari	08 Feb 2XX2	2 Hari
UAPA	10 Feb 2XX2	17 hari	Tgl Terakhir Feb 2XX2	2 Hari
Kemenkeu	Tgl Terakhir Feb 2XX2			



BAB III
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan Pokok

b. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Pokok

1. Rincian laporan yang dihasilkan dari aplikasi
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
 - d. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN
 - e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I dan Wilayah)
 - f. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Belanja melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I dan Wilayah)
 - g. Neraca dan Neraca Percobaan

2. Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
3. Daftar Rekening Pemerintah (dapat dengan *soft copy*)
4. Daftar atau tabel yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal
5. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Kementerian Negara/Lembaga
6. Ikhtisar Laporan Badan Lainnya.
7. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan



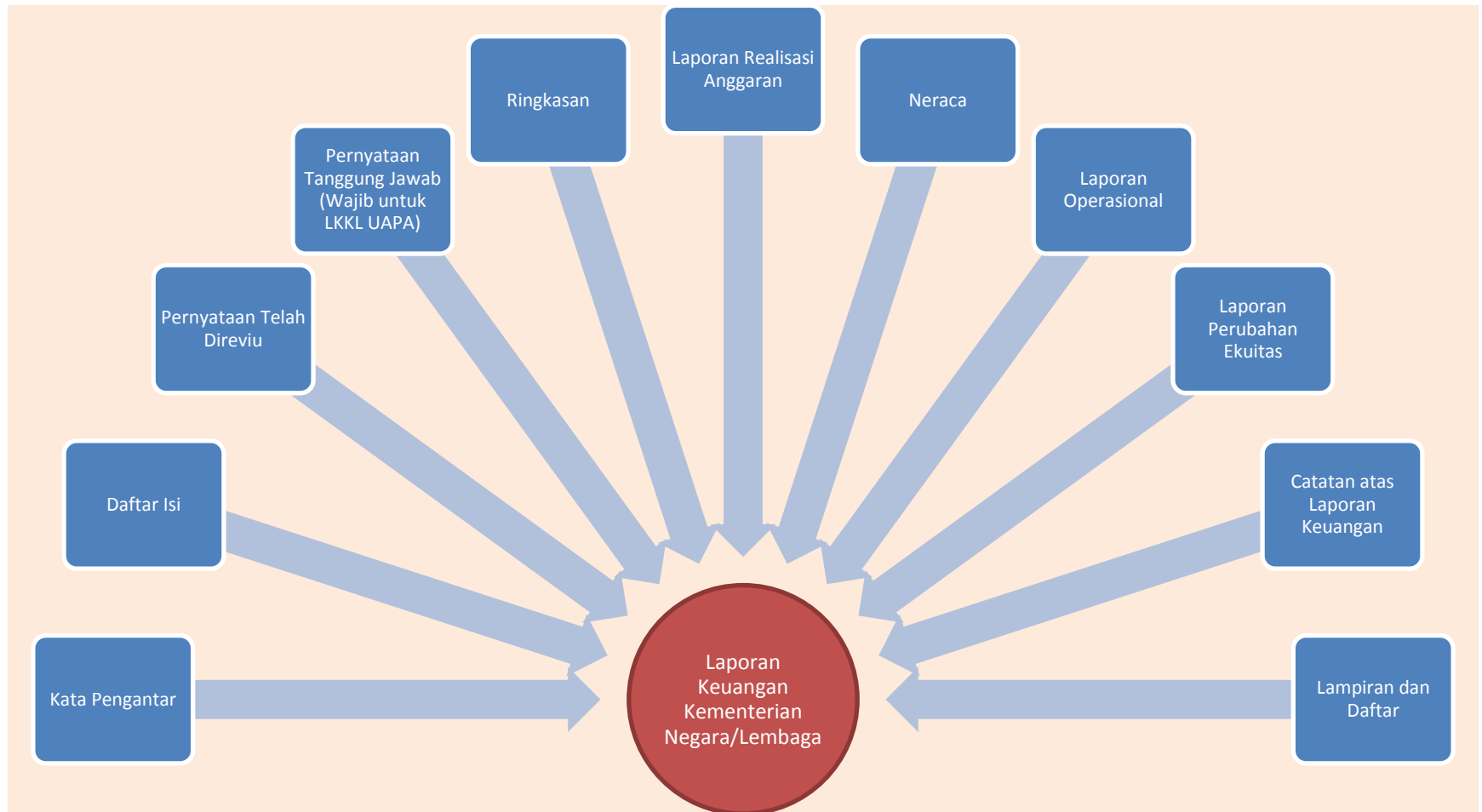
BAB IV

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

Ilustrasi Laporan Keuangan

- Ilustrasi merupakan **contoh** penyajian dan pengungkapan laporan keuangan
- Kementerian Negara/Lembaga harus **menyesuaikan dengan karakteristik** dan kebijakan akuntansi entitasnya

Unsur Laporan Keuangan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2016
Kepala,

Wulandari, CPA,MBA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2016

Eriksiawan, CA, CPA
Nip.1965082519851001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.250.000.000	2.850.000.000	126,67	1.950.000.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	19.000.000.000	18.457.200.000	97,14	19.200.000.000
Belanja Barang	B.4	40.400.000.000	39.851.000.000	98,64	37.050.000.000
Belanja Modal	B.5	33.300.000.000	31.904.300.000	95,81	90.812.700.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	600.000.000	600.200.000	100,03	420.000.000
JUMLAH BELANJA		93.300.000.000	90.812.700.000	97,33	147.482.700.000

NERACA

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	18.000.000	6.000.000
Kas pada BLU	C.3	990.000.000	1.500.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	120.000.000	54.000.000
Investasi Jangka Pendek BLU	C.5	357.500.000	112.540.000
Piutang PNBP	C.6	450.500.000	332.100.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.7	216.000.000	144.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	72.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	(15.377.500)	(2.668.500)
Belanja Dibayar di Muka	C.10	811.644.000	780.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	483.850.250	653.120.000
Persediaan	C.12	5.100.000.000	3.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		8.664.116.750	6.836.691.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	432.000.000	144.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	344.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	(13.000.000)	(1.008.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		763.000.000	200.592.000
ASET TETAP			
Tanah	C.16	36.300.000.000	18.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.17	12.983.885.000	6.300.000.000
Gedung dan Bangunan	C.18	47.970.000.000	42.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	2.040.000.000	300.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.20	630.000.000	540.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	2.250.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(17.491.644.250)	(14.111.664.250)
Jumlah Aset Tetap		84.682.240.750	53.028.335.750
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	1.641.000.000	625.700.000
Aset Lain-Lain	C.24	1.170.000.000	960.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(310.000.000)	(180.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		2.501.000.000	1.405.700.000
JUMLAH ASET		96.610.357.500	61.471.319.250
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	60.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	423.000.000	55.400.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.28	337.079.000	186.000.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	288.400.000	55.123.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	925.000.000	549.935.500
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	354.500.000	455.440.250
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.387.979.000	1.301.898.750
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	2.531.800.000	3.255.042.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		2.531.800.000	3.255.042.000
JUMLAH KEWAJIBAN		4.919.779.000	4.556.940.750
EKUITAS			
Ekuitas	C.33	91.690.578.500	56.914.378.500
JUMLAH EKUITAS		91.690.578.500	56.914.378.500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		96.610.357.500	61.471.319.250

LAPORAN OPERASIONAL

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	CATATAN	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNBP Lainnya		1.539.000.000	-
Pendapatan Badan Layanan umum		2.426.200.000	-
JUMLAH PENDAPATAN		3.965.200.000	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	19.820.000.000	-
Beban Persediaan	D.3	12.000.000.000	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.614.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	2.200.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.087.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	4.050.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	600.200.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.510.000.000	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(24.701.000)	-
JUMLAH BEBAN		59.856.499.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(55.891.299.000)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		72.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(9.000.000)	-
Surplus Defisit (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(25.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38.000.000	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(55.853.299.000)	-
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan Luar Biasa		252.000.000	-
Beban Luar Biasa		(372.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(120.000.000)	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(55.973.299.000)	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN	CATATAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	E.1	56.914.378.500	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(56.000.500.000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3	300.000.000	-
Koreksi Atas Nilai Aset Tetap	E.4	773.885.000	-
Koreksi Atas Beban	E.5	330.115.000	-
Koreksi Atas Pendapatan	E.6	(90.000.000)	-
Koreksi Lain-lain -- Hibah Masuk/Keluar	E.7	1.500.000.000	-
Jumlah		2.814.000.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		87.962.700.000	-
EKUITAS AKHIR	E.8	91.690.578.500	56.914.378.500

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

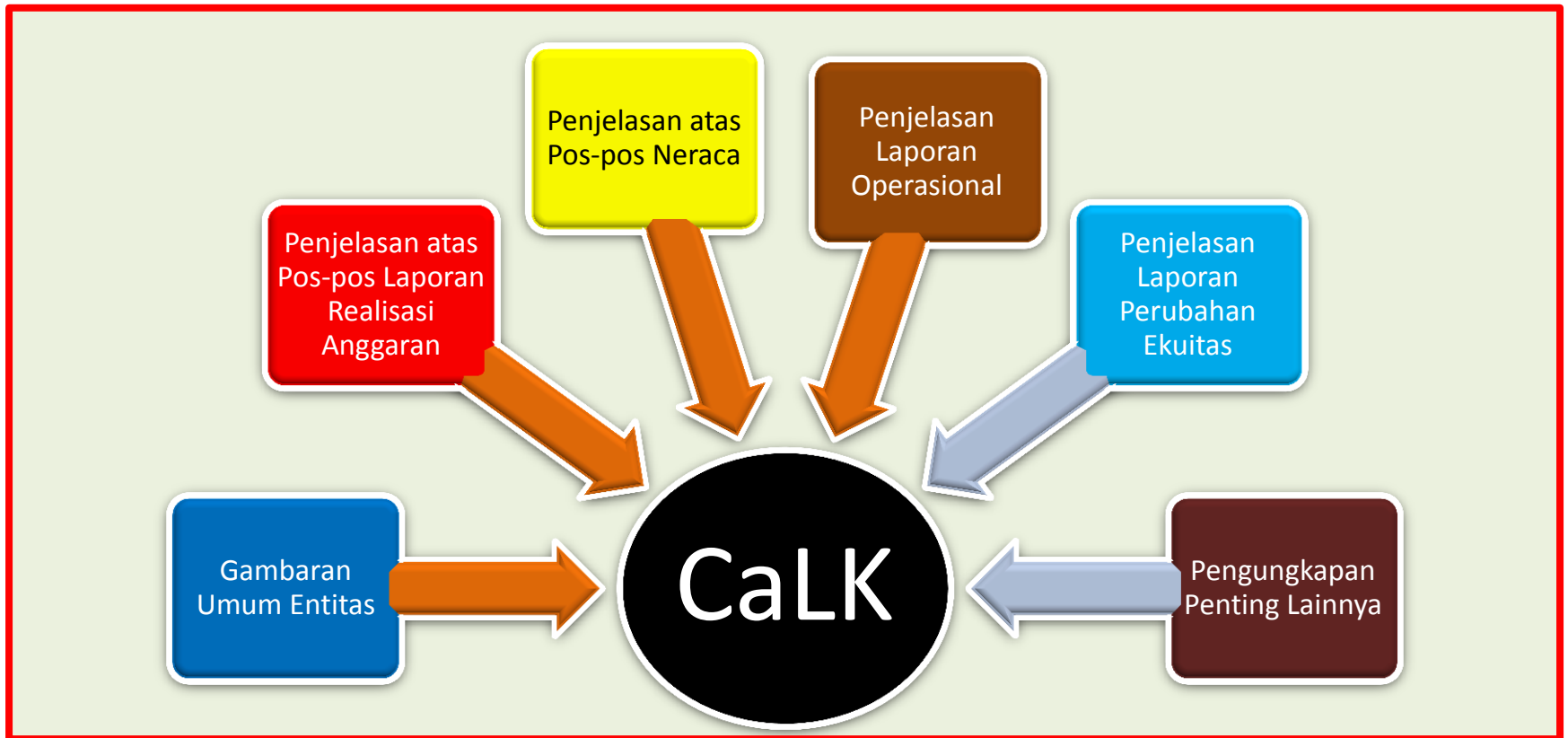
Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor: 6, Jakarta Pusat.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berkomitmen dengan visi ***"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui impementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual"***.

Sistematika Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan



THANK
YOU!

Powered by:

